

**Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi Lampung**

Jurnal Publikasi



Disusun dalam rangka menulis skripsi

Oleh :

Nama : Jodi Juliano
Nomor Mahasiswa : 12313295
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2016**

PENGESAHAN

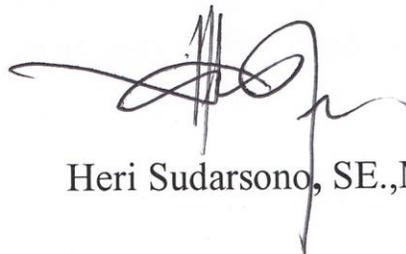
Memodelkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung

Nama : Jodi Juliano
Nomor Mahasiswa : 12313295
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 September 2016

Telah di setuju dan di sahkan oleh

Dosen pembimbing,



Heri Sudarsono, SE.,MEc

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

DI PROVINSI LAMPUNG

PADA TAHUN 1999 - 2014

ABSTRAKSI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan wilayah yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. Akan tetapi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sampai saat ini masih tergolong terendah se-Sumatera bahkan dibawah rata-rata angka IPM di Indonesia.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peran distribusi anggaran dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisis tentang faktor faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia periode 1999-2014 dengan variabel yang digunakan adalah Pengganguran terbuka, Realisasi anggaran sektor kesehatan, Realisasi anggaran sektor Pendidikan dan Kemiskinan. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pengganguran Terbuka tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel Realisasi anggaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel UMR Realisasi anggaran sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel Kemiskinan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengganguran terbuka, Realisasi anggaran sektor kesehatan, Realisasi anggaran sektor Pendidikan dan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses struktural dalam menyeimbangkan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spritual, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, serta intitusi-intitusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan dalam pendapatan dan pengetasan kemiskinan (Todaro, 2006).

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDG's), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. MDG merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun belakangan ini banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi United Nations Development Programme (UNDP) dalam buku "The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia" (BPS, 2007) dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya

rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.

Menurut Human Development Report 2007-2008, IPM Indonesia naik sebesar 0,728 pada tahun 2007 dan berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh United Nation Development Programme, UNDP. Secara umum Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2007-2011 selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Situasi perekonomian negara ini yang setiap tahunnya mengalami perubahan semakin membaik secara langsung berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Hal itupun provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dan bisa dilihat di Tabel 1. dibawah ini mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.

Tabel 1.1
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007–2011 di Provinsi –
Provinsi Pulau Sumatera

Nama Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77
Sumatera Utara	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65
Sumatera Barat	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28
Riau	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53
Jambi	71,46	71,99	72,45	72,74	73,3
Kepulauan Riau	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78
Bangka Belitung	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37
Bengkulu	71,57	72,14	72,55	72,92	73,4
Sumatera Selatan	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42
Lampung	69,78	70,3	70,93	71,42	72,45
Indonesia	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77

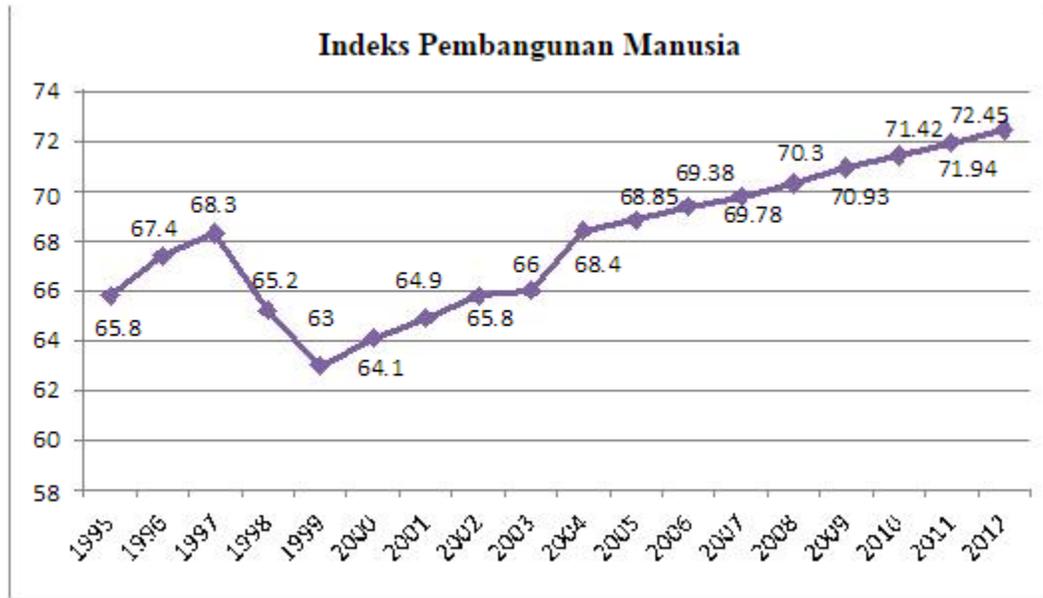
Sumber: BPS Pusat Indonesia, tahun 2013

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera setiap tahunnya dari tahun 2007-2011 selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari data diatas bahwa Provinsi Riau mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia yang paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Secara umum nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang terdapat di sepuluh provinsi Pulau Sumatera angkanya diatas nilai IPM Indonesia yang dihitung secara keseluruhan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini pantas bila provinsi-provinsi Pulau Sumatera menjadi barometer bagi laju pengembangan pembangunan dan perekonomian di Indonesia setelah provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Jawa.

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan paling dekat dari Pulau Jawa yang mungkin bisa menjadi poros atau gerbang pembuka perekonomian se-Sumatera. Dengan wilayah yang sangat strategis Provinsi Lampung seharusnya menjadi contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. Akan tetapi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sampai saat ini masih tergolong terendah se-Sumatera bahkan dibawah rata-rata angka IPM di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2007-2012 di tabel 1. Hal tersebut mencerminkan ada yang kurang baik dari perkembangan pembangunan manusia, kemajuan perekonomian dan sistem pemerintahan yang menyebabkan tidak berkembangnya Provinsi Lampung dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera.

Berikut ini disajikan data lebih lengkap tentang laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari Tahun 1995-2012 :

Tabel 1.3



Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

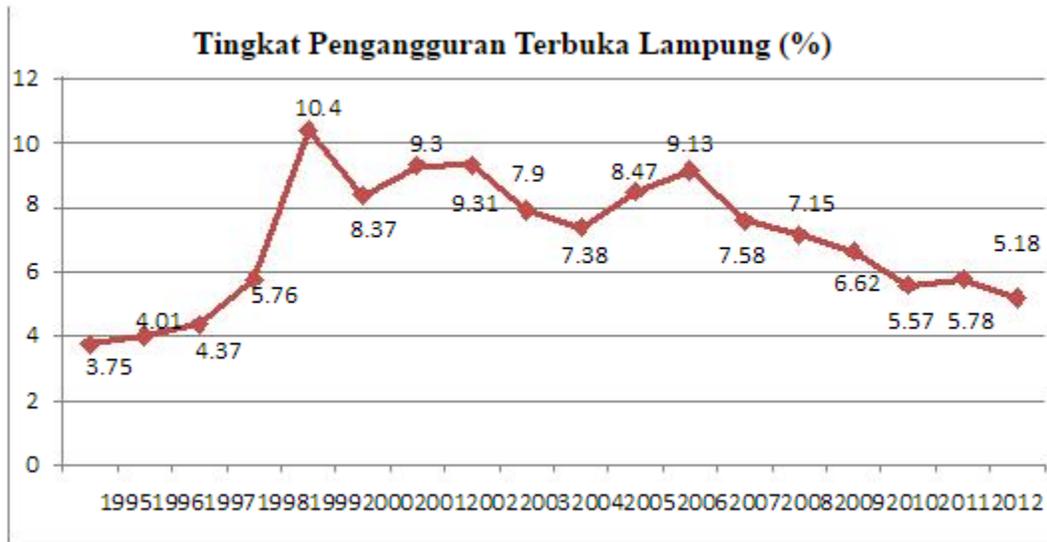
Berdasarkan gambar 1 bisa kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dari tahun 1995-2012 terjadi pergerakan yang fluktuatif, terutama tahun disaat sebelum dan sesudah krisis moneter. Namun pada tahun 1999-2012 tingkat dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan tetapi hal ini sangat membantu dalam segi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Pada tahun 2002 IPM Lampung yaitu 65,80 angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung dalam aspek Indeks Pembangunan Manusia masih digolongkan dalam kelompok menengah kebawah. Dalam skala internasional, status Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung angkanya tergolong dalam kelompok menengah ke atas ($66 < IPM < 80$), sehingga masih diperlukan komitmen dan kerja keras yang kuat dari pemerintah provinsi, dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada kualitas hidup.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia salah satunya pengangguran, dimana pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kepada rendahnya indeks pembangunan manusia karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya.

Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi. Bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pengangguran yang rendah merupakan faktor dalam peningkatan pembangunan manusia.

Tabel 1.4



Sumber: BPS Provinsi Lampung, tahun 2013 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 1995-2012 di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil gambar 2.2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 mengalami gejala yang fluktuatif, dimana persentase pertumbuhan tingkat penganggurannya terjadi naik turun. Terutama tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yang sangat signifikan saat dimana pasca krisis moneter antara tahun 1997-1999, bahkan pada tahun 1999 angkanya mencapai 10,4% di Provinsi Lampung dan ini menjadi tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi selama 18 tahun terakhir. Pada tahun 2002-2006 persentase tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tidaklah bagus, dikarenakan terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak menentu. Pada tahun 2007-2012 mulailah terjadi penurunan terus-menerus dalam persentase pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 dengan persentase pertumbuhan 7,58 % dan enam tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 jumlah persentase untuk tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,18%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa perekonomian dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran di Provinsi Lampung mengalami progres yang meningkat dan sangat baik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah akan menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah kabupaten/kota. Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri sehingga daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja publik pada bidang kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, yaitu: (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek

pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori Indeks Pembangunan Manusia, yang menekankan sangat pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Dikarenakan beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri, melalui peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan di Provinsi Lampung. Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengalokasikan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan agar mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Berikut ini adalah data tentang jumlah realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 1.5

Tingkat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan tahun 1999-2014 di Provinsi Lampung

Tahun	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
2006	38.622.654.461	106.173.200.065
2007	86.285.614.336	54.296.263.007
2008	75.431.164.716	160.866.569.603
2009	268.196.397.636	180.000.000.000
2010	236.025.869.519	119.332.118.836
2011	296.885.831.608	190.243.253.433
2012	284.422.915.478	260.975.962.752
2013	300.193.983.238	323.047.278.382
2014	295.664.882.843	334.893.405.336

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bagian Keuangan Provinsi Lampung (diolah).

Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Lampung pada tahun 1995-2012 cenderung mengalami peningkatan, terkecuali mengalami penurunan disaat masa krisis moneter antara tahun 1997-1998. Akan tetapi penurunan tersebut hanya terjadi dua tahun itu saja, dan pada tahun – tahun seterusnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan selalu mengalami peningkatan dari segupendanaan dan pelayanannya. Dengan demikian ini sangat berdampak positif bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh manapengaruh beberapa faktor seperti, tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan serta Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Oleh

karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014”.

KAJIAN PUSTAKA

Tria, Toto dan Saimul (2014) melakukan penelitian dengan judul “analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan ekonomi provinsi lampung tahun 2000 – 2013”, dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar. Adapun hasil penelitian tersebut adalah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar.

Baeti (2013), melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota provinsi Jawa tengah tahun 2007 – 2011”, dalam penelitian ini menggunakan metode data panel. Hasil dari penelitian ini adalah alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (variabel IPM). Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagai variabel *pure moderator*, IPM juga berperan sebagai variabel *intervening* (2008), dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Maryani (2010), melakukan penelitian dengan judul “analisis indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah”. Penelitian ini menggunakan metode data panel. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang telah dialokasikan oleh

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan berpengaruh positif dan signifikan. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang akan menaikkan IPM.

Brata (2002), melakukan penelitian dengan judul “pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional di Indonesia”. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan diadaptasi dari model yang telah digunakan oleh Ramirez dkk (1998). Hasil dari penelitian ini adalah Hasil estimasi memberikan bukti adanya hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia, termasuk di masa krisis. Pembangunan manusia yang berkualitas mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya kinerja ekonomi yang baik mendukung pembangunan manusia. Namun dalam masing-masing hubungan ini juga disertai dengan berperannya variabelvariabel lainnya seperti peran perempuan dan tingkat ketersediaan sumber daya alam. Adapun variabel boneka konflik tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pembangunan manusia maupun ekonomi regional. Barangkali hasilnya akan berbeda bila yang digunakan adalah data korban konflik. Hanya saja data tersebut sangat terbatas ketersediaannya.

Berdasarkan temuan yang ada, perlu digaris bawahi adalah bahwa pembangunan ekonomi haruslah tidak mengabaikan pembangunan manusia. Hal ini penting bukan hanya untuk mengurangi disparitas regional baik dalam hal pembangunan manusia maupun kinerja ekonomi regional itu sendiri, tetapi juga karena pertumbuhan ekonomi sendiri belumlah memadai untuk secara otomatis meningkatkan kualitas modal manusia.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda berfungsi untuk menjelaskan hubungan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Regresi linier juga memiliki fungsi sebagai

pengukur intensitas seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Regresi linier berganda memiliki beberapa jenis pengujian dalam pembuktian hipotesis. Hal ini untuk mengetahui hubungan variabel dependen terhadap variabel independen. Dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis untuk mengetahui hubungan variabel, diantaranya adalah uji R square, uji t, uji F serta uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Adapun definisi masing-masing pengujian :

Hasil Linier Berganda

Uji MWD

Penelitian ini menggunakan model uji *Mc Kinnon, White dan Davidson* atau yang sering dikenal dengan uji MWD. Model uji MWD bertujuan untuk membandingkan antara model regresi dan model regresi *log* linier sehingga mendapatkan hasil regresi linier terbaik.

Hasil uji dapat dilihat dengan cara membandingkan antara Z_1 dan Z_2 dengan α . Berikut Hasil dari uji MWD yang dilakukan penulis menggunakan *Eviews*:

Tabel 4. 1

Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier

➤ Hasil MWD model linier

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:26

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3272.185	1296.657	-2.523555	0.0302
X1	3.775926	1.616832	2.335386	0.0417
X2	-1.65E-10	7.01E-11	-2.357506	0.0401
X3	-2.98E-11	1.35E-11	-2.201256	0.0523
X4	3.825709	1.613886	2.370496	0.0392
Z1	786.1971	304.6319	2.580810	0.0274
R-squared	0.963361	Mean dependent var		68.98438
Adjusted R-squared	0.945041	S.D. dependent var		3.320869
S.E. of regression	0.778521	Akaike info criterion		2.617155
Sum squared resid	6.060952	Schwarz criterion		2.906876
Log likelihood	-14.93724	Hannan-Quinn criter.		2.631991
F-statistic	52.58634	Durbin-Watson stat		1.947563
Prob(F-statistic)	0.000001			

Berdasarkan hasil uji MWD menyatakan Z1 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis dan model yang tepat untuk di gunakan adalah model log linier.

Tabel 4. 2

Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model *Log Linier*

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 21:27

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.308010	0.287619	11.50138	0.0000
LOG(X1)	-0.003107	0.034430	-0.090233	0.9299
LOG(X2)	0.024756	0.005832	4.245093	0.0017
LOG(X3)	0.013323	0.007998	1.665721	0.1267
LOG(X4)	-0.007827	0.017837	-0.438835	0.6701
Z2	-0.003174	0.004926	-0.644288	0.5339
R-squared	0.973901	Mean dependent var		4.232778
Adjusted R-squared	0.960852	S.D. dependent var		0.048655
S.E. of regression	0.009672	Akaike info criterion		-6.168519
Sum squared resid	0.000972	Schwarz criterion		-5.878799
Log likelihood	55.34815	Hannan-Quinn criter.		-6.153683
F-statistic	74.63206	Durbin-Watson stat		1.573294
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Uji MWD Z_2 menyatakan Z_2 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier.

Berdasarkan hasil Z_1 dan Z_2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa model linier lebih baik dibandingkan *log* linier. Sehingga model linier digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Heterokesdastisitas

Uji heterokesdastisitas adalah uji untuk masalah pada varian dari variabel gangguan yang tidak dapat konstan atau stagnan. Dari uji heterokesdastisitas akan menghasilkan estimator masih linier dan bias (LUE), dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.348647	Prob. F(4,11)	0.3130
Obs*R-squared	5.264749	Prob. Chi-Square(4)	0.2612
Scaled explained SS	1.322657	Prob. Chi-Square(4)	0.8575

Pada hasil diatas bahwa nilai dari probabilita sebesar 0.8575 yang mana nilai tersebut lebih besar dari pada $\alpha = 5\%$ yang berarti dapat dilihat bahwa nilai prob-chi-square tidak signifikan berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna dengan semua variabel sebagai penjelas model regresi. Dapat diukur dengan cara koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,85 berarti terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Uji Korelasi

Variance Inflation Factors

Date: 08/20/16 Time: 18:02

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.94717	190.9007	NA
X1	0.154167	154.9776	7.212566
LOG(X2)	2.50E-23	11.54392	4.731273
LOG(X3)	3.16E-23	17.09114	7.900439
X4	0.007603	33.81834	1.522615

Nilai Centered VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas

4.3.3 Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. (Agus Widarjono, 2009)

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, peneliti menggunakan uji LM yang dicetuskan oleh Breusch-Godfrey yaitu dengan membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel. Jika chi square hitung lebih besar daripada nilai chi square tabel $\alpha = 5\%$, maka menolak H_0 berarti terdapat masalah autokorelasi sebaliknya.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.603747	Prob. F(2,9)	0.5675
Obs*R-squared	1.892718	Prob. Chi-Square(2)	0.3882

Berdasarkan hasil uji metode LM diatas memberikan beberapa informasi bahwa nilai probabilitas chi square sebesar 0.3882 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitas chi square lebih besar dari α maka gagal menolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi (Agus Widarjono,2009). Sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

1.3.4 Koefisien Determinasi R-squared (R^2)

Uji R-squared bertujuan mengukur persentase total variasi Y yang telah dijabarkan. Semakin angkanya mendekati 1 semakin baik dikarenakan menjelaskan bahwa data aktualnya begitupun sebaliknya.

Hasil estimasi sebesar 0.969810, artinya bahwa **96 %** variasi variabel dependen “Indeks Pembangunan Manusia Provisi lampung” menjelaskan oleh beberapa variabel independen “penggaguran terbuka, realisasi anggaran sektor kesehatan, realisasi anggaran sektor pendidikan,kemiskinan di provinsi lampung” , sedangkan sisanya sebesar **0,1%** dijelaskan oleh variabel lain pada luar model.

4.4 Uji Statistik

1.4.1 Uji F Statistik

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F hitung $<$ F kritis, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka

variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka disimpulkan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

R-squared	0.969810
Adjusted R-squared	0.958832
F-statistic	88.33921
Prob(F-statistic)	0.000000

. Fhitung (F-statistik) dalam perhitungan menggunakan E-views 9 sebesar 88.33921 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 ($< \alpha 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi regresi berganda, variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

H_a : paling tidak terdapat satu β tidak sama dengan nol

Besarnya F kritis pada $\alpha = 5\%$

$$df \text{ numerator } (k-1) = 5$$

$$df \text{ denominator } (n-k) = 27$$

$$F \text{ kritis} = 2,57$$

Hasil estimasi F hitung sebesar 88.33921 dan nilai F kritis dengan $\alpha = 5\%$ adalah **2,57** karena F hitung lebih besar dari F kritis maka **menolak H_0** artinya variabel independen **berpengaruh signifikan** terhadap variabel dependen.

4.4.1 Uji T Statistik

Tabel 4.4 Uji T

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/01/16 Time: 01:30

Sample: 1999 2014

Included observations: 16

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.23251	3.307199	22.44574	0.0000
X1	-0.314905	0.392309	-0.802697	0.4391
X2	1.53E-11	5.00E-12	3.072046	0.0106
X3	3.10E-12	5.61E-12	0.553418	0.5910
X4	-0.335406	0.087204	-3.846214	0.0027
R-squared	0.938957	Mean dependent var	68.98438	
Adjusted R-squared	0.916759	S.D. dependent var	3.320869	
S.E. of regression	0.958118	Akaike info criterion	3.002616	
Sum squared resid	10.09790	Schwarz criterion	3.244050	
Log likelihood	-19.09790	Hannan-Quinn criter.	3.014979	
F-statistic	42.30018	Durbin-Watson stat	1.243442	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Uji Statistik t adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan cara menguji masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil uji t hitung dan t tabel.

Untuk hasil akhir membandingkan probabilitas $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Maka probabilitas $< 1\%$, 5% dan 10% , variabel independent secara individu mampu mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan. Sebaliknya, apabila probabilitas > 1%, 5% dan 10%, artinya variabel independent secara individu tidak berpengaruh variabel dependen secara signifikan.

Hipotesis yang memaparkan pengujian ini adalah :

Hipotesis Satu Sisi Negatif

$H_0 : \beta \geq 0$ (Tidak Berpengaruh)

$H_a : \beta < 0$ (Berpengaruh)

Hipotesis Satu Sisi Positif

$H_0 : \beta \leq 0$ (tidak berpengaruh)

$H_a : \beta > 0$ (berpengaruh)

$N-k : 16-5 = 11$

a. Uji T terhadap Pengangguran di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar -0,802697.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung > t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di terima. Koefisien variabel dari pengangguran adalah sebesar -0.314905 sedangkan probabilitas sebesar 0.4291(>10%). Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel pengangguran secara individu negative tidak signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila pengangguran naik 1% maka IPM akan turun 0.314905%.

b. Uji T Terhadap Realisasi Anggaran Kesehatan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar 3.072046

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung < t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehtan adalah sebesar $1.53E-11$ sedangkan probabilitas sebesar $0.0106(<10\%)$. Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila kesehatan naik 1% maka IPM akan naik 0.314905%.

C. Uji t terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar 0.553418.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di ketahui t hitung < t kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehtan adalah sebesar $1.53E-11$ sedangkan probabilitas sebesar $0.5910(<10\%)$. Secara statistic dalam taraf signifikansi 10% maka variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistic menunjukkan apabila pendidikan naik 1% maka IPM akan naik 3.10%.

a. Uji T Terhadap Kemiskinan di Lampung

Berdasarkan nilai uji T dengan derajat kebebasan 11 dan alfa = 10%, maka dapat di peroleh nilai T table sebesar 1.363. Sedangkan , untuk nilai T hitung sebesar -3.846214.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui t hitung $< t$ kritis, sehingga H_0 di tolak dan H_a di tolak. Koefisien variabel dari kesehatan adalah sebesar $1.53E-11$ sedangkan probabilitas sebesar $0.0027 (> 10\%)$. Secara statistik dalam taraf signifikansi 10% maka variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Secara statistik menunjukkan apabila pendidikan naik 1% maka IPM akan turun 0.335406% .

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil Analisis mengenai pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung menunjukkan tidak berpengaruh signifikan karena selamadasawarsa terakhir, ekonomi lampung bergerak berpindah menjadi perekonomian yang lebih berorientasi kepada jasa dan modal-intensif seperti keuangan, telekomunikasi, pertambangan—yang notabene menyerap tenaga kerja lebih sedikit karena memerlukan tenaga kerja terampil. Hal ini kemudian menyinkirkan kurang berpendidikan dan kurang memenuhi tuntutan lapangan kerja dari berkah pembangunan ekonomi manusia lampung yang meningkat setiap tahunnya.
- b. Hasil analisis mengenai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Apabila kualitas pendidikan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

c. Hasil analisis mengenai Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Apabila kualitas kesehatan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

d. Pada penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal tersebut disebabkan tidak meratanya hasil pembangunan, oleh karena itu diharapkan pemerintah tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi lampung saja, tetapi pemerataannya juga harus lebih diperhatikan dengan kebijakan yang difokuskan pada sektor riil seperti pertanian. daerah Lampung merupakan daerah yang strategis dan merupakan menjadi basis pertanian. Namun sangat disayangkan ketika penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru tetap tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana desa sendiri yang diharapkan jadi penolong tidak bisa digunakan secara maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman pengelolaan dana.

5.2.Implikasi dan Saran:

a. Pemerintah sangat tidak serius dalam membangun sektor-sektor unggulan provinsi lampung yang bisa meningkatkan pembangunan manusia di lampung karena alokasi anggaran untuk membangun sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut dan darat, serta untuk membangun infrastruktur pertanian, pedesaan, dan perikanan masih relatif terlalu kecil.

b. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain dengan memberikan bantuan- bantuan pendidikan berupa beasiswa, perbaikan gedung-gedung sekolah yang kurang layak, dan menambah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti buku-buku bacaan di setiap institusi pendidikan yang ada di Provinsi Lampung.

c. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, serta mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

d. Dewasa ini produktivitas sektor industri dan sektor jasa sudah lebih dari tujuh kali lipat dan tiga kali lipat daripada sektor pertanian. Sementara itu nilai tukar petani juga terus menurun. Kombinasi dari kedua kondisi ini membuat tingkat kesejahteraan

mereka yang bekerja di sektor pertanian tertinggal semakin jauh dalam sirkuit balap antarsektor. Dengan kata lain mereka menjadi semakin miskin. Di tambah jumlah kredit yang dialokasikan oleh perbankan ke sektor industri dan jasa jauh lebih besar daripada ke sektor pertanian. Sudah seharusnya pemerintah memfokuskan alokasi dana pemerintahan yang besar untuk pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing keluarga petani di Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Hubban. 2013. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. FE Universitas Bung Hatta.
- Basri, F. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Erlangga. Jakarta.
- BPS. 2000-2015. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, beberapa terbitan. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2000-2015. Lampung Dalam Angka, beberapa terbitan.
- Putra, Adi Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. FEB Universitas Lampung.
- Rahayuningsih, Ida, dkk. 2009. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Dampaknya Pada Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi Di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos Vol. 6, No. 2, Hal. 256 – 274.
- Sugiharto, Slamet. 2007. Komitmen Pembangunan Manusia. Ilmiah Widyaaiswara Indonesia dan Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suminto. 2004. Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan). Jakarta.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.

Usmaliadanti, Christina. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. FE Universitas Diponegoro. Semarang.